

DAFTAR PUSTAKA

1. Atep Adya Barata, *Memahami Pengadilan Pajak Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak dan Bea Cukai*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003
2. Ali Kadir, *Eksistensi Peradilan Pajak di Indonesia*, FH UI, Depok, 2002
3. Ali Purwito M dan Rukiah Komariah, *Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Bandung, Edisi revisi*, Lembaga Kajian Hukum Fiskal FH UI, Jakarta, 2007
4. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
5. Djamiludin Gede, *Hukum Pajak*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta 2002
6. Direktorat Anggaran Departemen Keuangan RI, *Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan 2013*
7. Gatot S.M. Faisal, *How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas*, Grasindo, Jakarta
8. H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Cet 6, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
9. <http://www.pajak.go.id/content/article/Kesadaran-Masyarakat-Tentang-Pajak-Setelah-Satu-Dekade-Reformasi-Pajak>, Dunduh Pada Tanggal 21 Oktber 2013
10. <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/SKP.pdf> diunduh tgl 24 Oktober 2013 pk. 15.26 WIB
11. Indrajaya Burnama S.ST, *Pembetulan SPT Dengan Sepenuh Hati*, Indonesian Tax Review Volume V/Edisi 09, 2012
12. Liberti Pandiangan, Rayendra L. Toruan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan: Berdasarkan UU Terbaru*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2007
13. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999
14. Muhammad Sukri Subki & Djumadi , *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, Elex Media Computindo, Jakarta, 2007
15. Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Ed.3), Penerbit Salemba Empat, Jakarta
16. Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Penerbit Andi, Jakarta, 2009
17. Mardiasmo, *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011), Penerbit Andi, Yogyakarta 2011
18. Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
19. Malimar, *101 Putusan Majelis Pertimbangan Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1974
20. Nisa Istiana, *Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak*, tulisan bisa dilihat di <http://www.pemantauperadilan.com/opini/21.MENELAAH%20KEBERADAN%20PENGADILAN%PAJAK.pdf>
21. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet-6, Kencana, Jakarta

22. Prof. Dr. Rochmat Soemitro. SH, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, 1990
23. Prof. Mr. Kuntjoro Purbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1981
24. Phipipus M. Hadjon et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
25. Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, Eresco, Bandung, 1990
26. Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*, Eresco, Bandung
27. R. Santoso Brotodihardjo, [Pengantar Ilmu Hukum Pajak](#), Edisi Ke-3, PT Refika Aditama, Bandung, 1998
28. Rukiah Handoko (b), *Eksistensi dan Kompetensi Pengadilan Pajak*, FH UI Bidang Kajian Hukum Pajak, Depok,
29. Riski Argama, *Pengadilan Pajak di Indonesia: Aturan Dan Pelaksanaannya Sebagai Solusi Sengketa Pajak*, Makalah Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Desember 2005
30. RDH. Koesoemahatmadja, S.H, *Pengantar Hukum tata Negara*, Alumni, bandung 1975
31. Ruki Komariah Dan Ali Purwito M, *Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabeanan, Dan Cukai*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2006
32. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aitya Bakti, Bandung, 1996, Hal 9
33. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1985
34. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet-3*, UI Press, Jakarta, 2006
35. Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 2010
36. Tony Marsyahrul , *Pengantar Perpajakan (Rev)*, Grasindo, Jakarta, 2007
37. Tax Focus, *Maju Tak Gentar Pengajuan Keberatan Hingga Bbanding*, Indonesian Tax Review Volume V, Edisi 05, 2012
38. Tjip Ismail, *Pengadilan Pajak dan Kepastian Hukum diTengah Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum No. 2 Vol 17 April 2010
39. Y.W. Sunindhia, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, Rikene Cipta, Jakarta, 1992
40. YW.Sunindhia, S.F., dan Dra. Ninik Widiyanti, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi* , Rineka Cipta, Jakarta, 1990
41. Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Lembaga Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009
42. Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadlian dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2009
43. Yacob Yahya, SE, Ak. PMK-8/PMK.03/2013: *Dari Pilihan Jalan Upaya Hukum Hingga Korting Sanksi Administrasi*, Indonesian tax review Volume VI/Edisi 16, 2013

44. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 5*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008
45. Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak)*, Cet, 1, refina Aditama, bandung, 2006

Peraturan - Peraturan

46. Undang-Undang Dasar 1945
47. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 Tentang *Pengubahan Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken* diubah menjadi Majelis Pertimbangan Pajak
48. Undang-Undang No 19 Tahun 1964 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*
49. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*
50. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
51. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
52. Undang-Undang No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*
53. Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang *Badan Penyelesaian Sengketa Pajak*
54. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*
55. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang *Pengadilan Pajak*
56. PMK No. 145/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012 tentang *Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan*
57. Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012 tentang *Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak*
58. Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan*
59. Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak*
60. Surat Edaran Dirjen Pajak No. 11/PJ./2013 Tanggal 26 Maret 2013 Tentang *Rencana Dan Strategi Pemeriksaan 2013*